

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas proses pencairan dana SP2D maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuatan SPP dan SPM pada SKPD yang mengajukan permintaan pencairan dana akibat kurang telitnya bendahara dan fungsi verifikasi PPK yang tidak jalan sebagaimana mestinya.
2. Lambatnya proses verifikasi PPK dikarenakan pada saat bendahara mengajukan SPP PPK tidak berada di tempat. Begitu juga halnya dengan Penanda tangan SPM oleh PA/KPA terkadang juga terhambat karena hal yang sama.
3. Keberadaan Verifikator dan kurangnya koordinasi antar verifikator pada bidang perbendaharaan mempengaruhi proses penerbitan SP2D
4. Pembayaran berbagai tagihan sering kali menumpuk di penghujung tahun anggaran. Pengesahan APBD Perubahan yang dijadwalkan pada Triwulan empat pada tiap tahun anggaran merupakan penyebab lain terjadinya peningkatan volume penerbitan SP2D di akhir tahun.

4.1.1 Saran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak BPKAD sebagai berikut:

1. Hendaknya bendahara dalam membuat SPP lebih teliti dan fungsi verifikasi PPK yang harus berjalan sebagaimana mestinya.
2. Bendahara harus dapat menyesuaikan jadwal PPK dan PA/KPA untuk mengatasi lambatnya proses verifikasi PPK.
3. Verifikator harus selalu berada di tempat dan berkoordinasi dengan verifikator lain jika ada kegiatan lain yang mendesak.
4. Bidang Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat membuat jadwal Pengesahan

APBD Perubahan lebih awal sehingga dapat meminimalisir terjadinya peningkatan volume penerbitan SP2D di akhir tahun.

